



In partnership with **Canada**



Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang – RPHJP Mendorong pengelolaan hutan berbasis lanskap di tingkat tapak yang berkelanjutan dan tangguh di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur

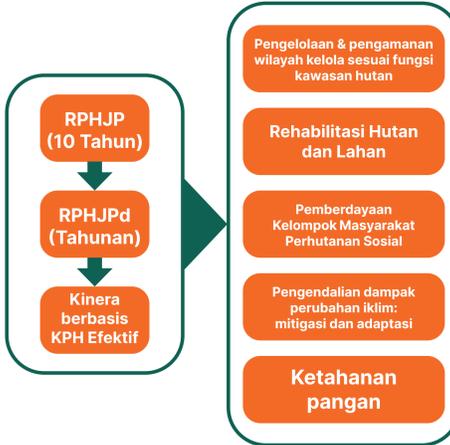
Mitra utama: KPH Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur), KPH Cenrana & KPH Ulubila (Sulawesi Selatan), & KPH Lalan Mendis (Sumatera Selatan)

CIFOR L4L Team: Ani Adwinata, Fatwa Susanti, Agus Andrianto, Penza Lindiani, Alienda Fauzia, Adita Noveastuti & Nining Liswanti

ICRAF L4L Team: Suyanto, Thifali Adzani, & Rendra Bayu Prasetyo Tim Lapangan TTS (Christian Koenunu, Dimas, Bona, Andrys & Andro) Tim Lapangan Bone (M. Fiqhi Rahman, Ikhsan, Andika, Iqbal & Edel)

1 Latar Belakang

Peran dan kewajiban KPH: Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan di Wilayah Hutan Kelola



Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja unit KPH atau unit KPH dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dikelola secara efisien, efektif, dan lestari

Secara kelembagaan: Unit kerja KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Provinsi

Sumber: PP 23 (2021) & Permen 7 & 8 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021)

Tantangan terbesar:

Dari 532-unit KPH seluruh Indonesia baru 254 RPHJP yang sudah disusun dan disahkan

Dari 254 RPHJP, baru 28 RPHJP yang direvisi sesuai PP 23 (2021) & Permen KLHK No. 7 & 8 (2021)

4 Hasil kegiatan lanjutan setelah selesainya dokumen RPHJP

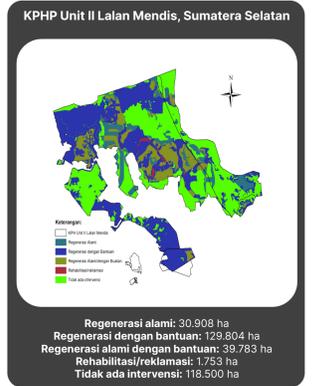
Opsi intervensi restorasi berbasis Sub-Landscape (SL) berdasarkan persepsi masyarakat melalui FGD FLORAS dan analisis spasial



KPH Unit XVIII Cenrana dan KPH Unit XIX Ulubila Bone, Sulawesi Selatan



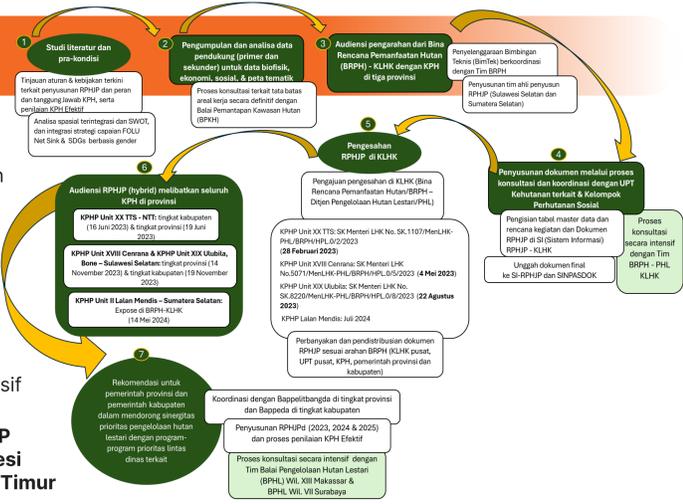
KPH Unit XX Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur



KPH Unit II Lalan Mendis, Sumatera Selatan

2 Tujuan

Dokumen perencanaan pengelolaan hutan berkelanjutan, sebagai acuan pengembangan master plan Restorasi Hutan berbasis Lanskap, yang mencakup integrasi prioritas Land for Lives terkait perbaikan bentang lahan untuk penghidupan masyarakat yang berketahanan iklim dan berbasis gender secara inklusif



Fasilitasi penyusunan RPHJP di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur

5 Pengembangan Area Terpadu (Integrated Area Development) di Hutan Lindung Koa, Besipae, Wilayah KPH Unit XX Timor Tengah Selatan, NTT

- Diprioritaskan pada lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan
- Tata kelola berbasis Perhutanan Sosial (PS) untuk di kawasan hutan dan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah jelas kelembagaannya untuk di Areal Penggunaan Lain (APL)
- Mendorong dukungan pemerintah kabupaten untuk bersinergi dengan program-program lintas sektor terkait di kabupaten dan disepakati bersama
- Inisiatif IAD diinternalisasi di dokumen-dokumen strategis perencanaan daerah lainnya yang didamping melalui kegiatan Land for Lives
- IAD master plan merupakan platform untuk mencari peluang skema pendanaan (APBD dan non-APBD) dan pembiayaan inovatif dengan pihak lainnya, serta mengarahkan lokasi prioritas untuk pengembangan program ketahanan pangan

Kegiatan yang telah dilaksanakan:

- Diskusi dengan Dinas LHK NTT dan KPH
- Diskusi dengan Dirjen PSKL (29 September 2023)
- Sosialisasi IAD di tingkat kabupaten TTS (26 Januari 2024)
- Pengajuan usulan permohonan perizinan PS untuk Desa Mio dan Desa Linamutu (seluruh dokumen sudah disubmit ke KLHK pada 16 Feb 2024)
- Penyusunan master plan IAD dan perbaikan

Pertemuan dengan Dirjen PSKL-KLHK dan para direktur terkait pengembangan IAD dan follow up Surat Gubernur NTT kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (29 Februari 2024)

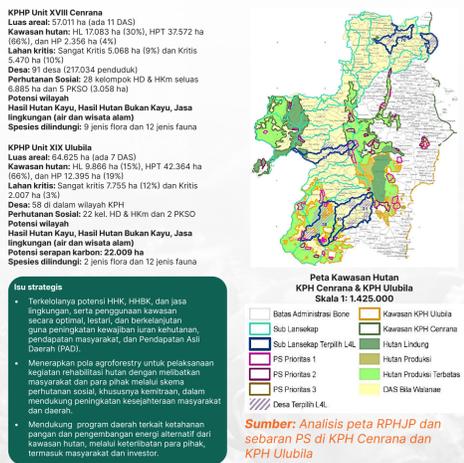


3 Potensi wilayah dan isu strategis pengelolaan hutan

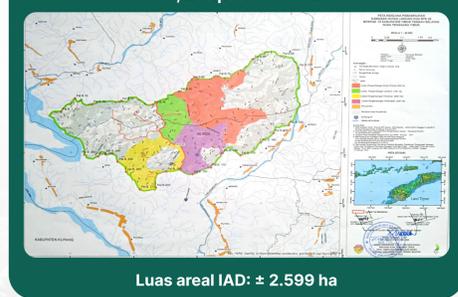
RPHJP dan RPHJpd yang telah diselesaikan



Pengelolaan hutan KPH Cenrana & KPH Ulubila, Bone, Sulawesi Selatan



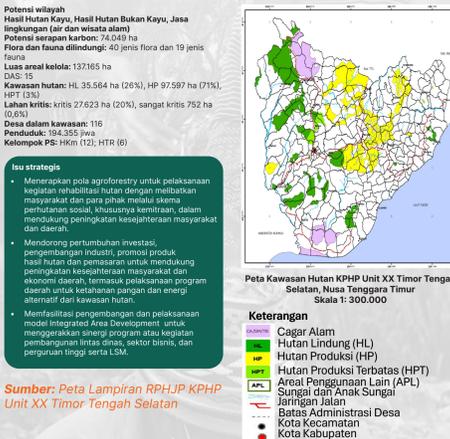
Peta Rencana Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung Koa, Besipae untuk IAD



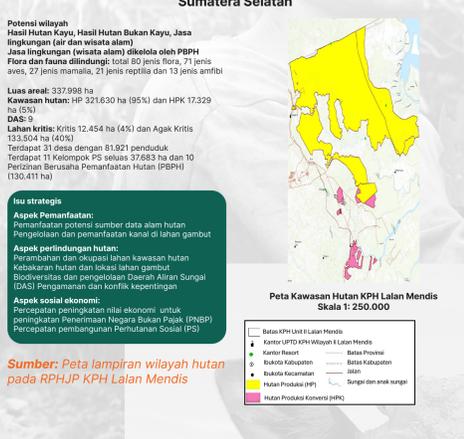
Pengembangan Master Plan IAD berbasis:

- Agrosilvoputura and agroindustri
- Interkoneksi ekowisata
- Pemulihan danau berbasis agroforestri
- Akses kelola: Perhutanan Sosial dan Redistribusi Lahan
- Bimbingan, monitoring, evaluasi dan kajian secara partisipatif

Pengelolaan hutan di KPH Unit XX Timor Tengah Selatan - NTT



Pengelolaan hutan di KPH Unit II Lalan Mendis, Musi Banyuwangi, Sumatera Selatan



6 Simpulan dan rekomendasi

- Dengan disahkannya dokumen-dokumen RPHJP berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tingkat KPH, telah membuka peluang kerjasama dan pendanaan kegiatan pengelolaan dari pemerintah pusat, antara lain pengembangan agroforestri mendukung Program FOLU Net -Sink di provinsi masing-masing.
- Penguatan kelembagaan kelompok-kelompok Perhutanan Sosial dan mendorong usulan-usulan PS baru, merupakan bagian penting dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat seperti yang tercantum dalam RPHJP, dan merupakan platform kelembagaan yang kuat untuk mengadopsi master plan Restorasi Hutan berbasis Lanskap (RHL) berbasis gender yang inklusif.
- Pengembangan master-plan dengan pendekatan Integrated Area Development (IAD) merupakan platform untuk mensinergikan master plan RHL di dalam kawasan hutan dan di APL, yang sejalan dengan program-program prioritas di kabupaten.
- Mendorong kerjasama dan koordinasi dengan POKJA Perbaikan Pengelolaan Bentang Lahan (PPBL) yang difasilitasi oleh Land for Lives, dan juga dengan UPT-UPT Kehutanan terkait, untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan kelompok PS yang diharapkan akan menjadi local champions yang akan mengadopsi master plan RHL Land for Lives.
- Diperlukan inventarisasi Cross Cutting Issue di Land for Lives untuk memastikan sinergi program dan kegiatan antar Paket Kerja Land for Lives di tingkat tapak.

Bentang lahan berkelanjutan untuk penghidupan berketahanan iklim di Indonesia

#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id